

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Sebuah instansi pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar (aset tetap).

Perusahaan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk harta yang bersifat tahan lama dan dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam akuntansi dikenal dengan istilah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap berwujud meliputi berbagai bentuk kekayaan yang digunakan dalam operasi perusahaan yang biasa secara permanen atau untuk jangka panjang.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan

banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah atau sumbangan dan donasi dan banyak lagi cara untuk mendapatkannya. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut. Pencatatan yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat perolehan meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi pemerintah, sampai dengan aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan pemerintah.

Aset tetap diperlukan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah instansi pemerintahan. Untuk memperoleh aset tetap diperlukan dana yang jumlahnya cukup material, untuk itu diperlukan suatu akuntansi aset tetap agar pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada instansi tersebut.

Aset tetap memiliki kontribusi yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika pengelolaan aset tetap dilakukan dengan maksimal akan dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah terutama dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya dapat ditingkatkan

dengan adanya pemanfaatan aset tetap untuk pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan. Perlakuan aset tetap yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Aset Tetap adalah Standar yang mengatur tentang aset tetap dapat mengintegrasikan arus uang dan arus barang dengan menerapkan double entry dan pemahaman akan pentingnya akuntansi aset tetap.

Ruang lingkup untuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan, apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis. Permasalahan aset yang terjadi pada Kecamatan Kotarih yaitu inventarisasi aset tetap yang belum maksimal sehingga informasi tidak akurat, lengkap, dan mutakhir. Inventarisasi sangat penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Yang menjadi pengertian inventarisasi adalah kegiatan untuk

melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendapatan barang milik daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang sama yaitu :

1. penelitian yang dilakukan oleh Evi Risnawati Purba (2018) yang berjudul: “Akuntansi Aset Tetap Pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap yang digunakan pada kecamatan silou kahean kabupaten simalungun belum sepenuhnya menggunakan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 khususnya dalam penghentian dan pelepasan aset tetap, dan juga metode penyusutan aset tetap pada kecamatan silou kahean kabupaten simalungun adalah menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta lemah dan kurangnya sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga mengalami permasalahan dalam pengelolaan aset.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asima Maya Shanty Simatupang (2017) yang berjudul: “Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupeten Humbang Hasundutan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan kesalahan dalam pencatatan harga perolehan aktiva tetap kendaraan, karena tidak mencatat pengeluaran belanja untuk BBN kendaraan dinas sebagai harga perolehan aktiva tetap. Biaya tersebut telah dicatat sebagai belanja operasional pada periode akuntansi berjalan. Akibatnya pada neraca harga perolehan kendaraan terlalu kecil, dan juga Pemerintah Kabupeten Humbang Hasundutan belum dapat memisahkan

secara tepat antara pengeluaran belanja modal dengan pengeluaran belanja operasional. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencatat pengeluaran belanja modal berupa pergantiaan ban kendaraan yang jumlahnya cukup besar dan dapat memberikan manfaat untuk beberapa periode akuntansi sebagai pengeluaran belanja operasional. Akibatnya neraca harga perolehan kendaraan terlalu kecil. Sehubungan dengan adanya kesalahan dalam pencatatan pengeluaran belanja modal menjadi pengeluaran belanja operasi, maka nilai perolehan atas aktiva kendaraan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga berubah. Perubahan nilai perolehan tersebut akan mempengaruhi nilai penyusutan aktiva tetap kendaraan, dimana akumulasi penyusutan semakin besar.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Risnawati Purba dan yang dilakukan oleh Asima Maya Shanty Simatupang yaitu sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Risnawati Purba dan yang dilakukan oleh Asima Maya Shanty Simatupang terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode analisis data yang digunakan oleh Evi Risnawati Purba dan Asima Maya Shanty Simatupang sama yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis

deduktif, selain dari itu perbedaan mendasar juga terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan. Evi Risnawati Purba melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan objek penelitian adalah akuntansi aset tetap pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 05, Nagori Dolok, dan Asima Maya Shanty Simatupang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan objek penelitian adalah akuntansi aset tetap pada Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berlokasi di jalan bukit inspirasi, Doloksanggul.

Kecamatan Kotarih adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Di Kecamatan ini terdapat 11 Desa antara lain: Desa Bandar Bayu, Desa Banjaran Godang, Desa Durian Kondot, Desa Huta Galuh, Desa Kotarih Baru, Desa Kotarih Pekan, Desa Perbahingan, Desa Rubun Dunia, Desa Sei Kari (Sei Karih), Desa Si Ujan-Ujan(Sei Ujan-ujan), dan Desa Sialtong. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Kotarih dapat dilihat dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai
Neraca Aset Tetap
Per 31-Dec-2018,2019

Uraian	2019	2018
ASET TETAP		
Tanah	3.300.000,00	3.300.000,00
Peralatan dan Mesin	467.706.284,00	467.706.284,00
Gedung dan Bangunan	1.438.231.000,00	1.438.231.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	(1.154.241.197,00)	(1.058.388.581,00)
JUMLAH ASET TETAP	754.996.087,00	821.588.703,00

Sumber: Kantor Camat Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai

Aset-aset tetap inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan normal pada Kantor Camat Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis, untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengurangi bagaimana instansi Kantor Camat Kotarih menerapkan akuntansi aset tetap sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Kantor Camat Kotarih sebagai objek penelitian. Penelitian ini nantinya akan saya laporkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR CAMAT KOTARIH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

1.2.Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah daerah tidak lepas dari masalah yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai tujuan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Camat Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07?**

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerinah (PSAP) No. 07.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai manfaat dari hasil yang diperoleh, yaitu memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi fakta, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah terjadi.

Dengan dilakuannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi aset tetap.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai masukan dan perbaikan bagi Pemerintah Kecamatan Kotarih.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan dan penelitian Akuntansi Aset Tetap.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Akuntansi Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Ada beberapa definisi dan pengertian akuntansi yang berasal dari beberapa lembaga yang dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda.

Menurut *American Accounting Association* (1996) seperti yang dikutip Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014),

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.¹

Dari buku Akuntansi Keuangan Daerah oleh Erlina, et al., Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan **“Akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”²**

Dari buku Teori Akuntansi oleh Adanan Silaban dan Berliana Lumban Gaol mendefinisikan akuntansi:

Akuntansi merupakan suatu alat yang menyediakan dan mengkomunikasikan informasi terutama yang bersifat keuangan atas suatu

¹Erlina, et al., **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, Cetakan Keempat, Jakarta: Salemba Empat, 2018, Hal 1

² **Loc. Cit.**

entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.³

Dari ketiga definisi akuntansi tersebut, maka definisi akuntansi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

1. Fungsi kegunaan

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

2. Proses kegiatan

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.⁴

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah membuat perubahan terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, basis akrual untuk pengakuan aset, serta kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan disusun

³Silaban, Adanan dan Berliana Lumban Gaol, **Teori Akuntansi**, Buku 1, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2019, Hal 2

⁴Erlina, et al., **Op. Cit.**, hal 1

mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP). SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDP-LK) sama-sama menunjuk pada empat pihak, yaitu komite penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa (auditor), dan para pemakainya.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, kerangka ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. standar ini diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai investasi pemerintah menggunakan PSAK. Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Menurut Abdul Halim dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

Aktiva Tetap adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasinya Pemerintah Daerah dan memiliki masa manfaat di masa yang akan datang lebih dari satu periode anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual.⁵

Aset tetap menurut PSAP No. 07 Paragraf 4 dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah oleh Erlina, Dkk, mengatakan:

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.⁶

Dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa oleh Indra Bastian, menyatakan bahwa:

Barang yang dikelola dan menjadi unsur laporan administrasi keuangan serta kependudukan di kecamatan dan desa adalah barang milik Negara. Barang milik negara di lingkungan kecamatan dan desa adalah seluruh barang yang pengadaannya, sebagian atau seluruhnya, dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran belanja negara, termasuk anggaran di luar anggaran belanja kecamatan dan desa tetapi barang tersebut anggaran di luar anggaran belanja kecamatan dan desa tetapi barang tersebut berada dibawah pengurusan serta penguasaan kecamatan dan desa.”

Adapun tugas pengadministrasian barang milik negara di kecamatan dan desa antara lain:

⁵Halim, Abdul, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta: Salemba Empat, 2002

⁶Erlina, et al., **Op. Cit.**, Hal 245

- 1. Membuat Kartu Inventarisasi Barang**
- 2. Membuat Kartu Penerimaan Barang**
- 3. Membuat kode/nomor barang sesuai peraturan yang berlaku**
- 4. Membuat Laporan Triwulan/Semester/Tahunan**
- 5. Membuat Perencanaan Pengadaan Barang**
- 6. Mengusulkan Penghapusan Barang**
- 7. Membuat buku daftar barang milik daerah di kecamatan dan desa bersangkutan.⁷**

Dari definisi-definisi aset tetap tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik

Aset tetap yang dimiliki pemerintah selain memiliki bentuk secara fisik juga dapat dilihat secara jelas.

2. Digunakan secara aktif dalam kegiatan normal pemerintah

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dipergunakan secara langsung dalam kegiatan normal perusahaan. Dengan demikian apabila pengadaan aset tetap oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk kepentingan kegiatan pada masa yang akan datang, maka digolongkan sebagai investasi jangka panjang dan bukan sebagai aset tetap.

3. Dimiliki tidak untuk diperdagangkan

Pengadaan aset tetap dalam pemerintah dimaksudkan untuk dipergunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan sebagaimana halnya barang dagangan pemerintah. Dalam beberapa hal aset tetap boleh dijual kembali apabila tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah yang disebabkan oleh

⁷Bastian, Indra, **Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa**, Jakarta: Erlangga, 2015, Hal 345

faktor masa manfaat maupun faktor perkembangan teknologi. Apabila aset tetap ditujukan untuk diperjualbelikan, maka digolongkan ke dalam perkiraan persediaan pemerintah.

4. Mempunyai jangka waktu kegunaan (umur) relatif permanen (lebih dari satu periode akuntansi)

Maksudnya bahwa aset tetap dapat digunakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, sesuai dengan masa manfaatnya dan nilainya yang relatif material bagi pemerintah.

Berdasarkan keempat syarat aset tetap tersebut disimpulkan bahwa aset tetap harus mampu menyediakan manfaat yang berulang-ulang dan normalnya diharapkan berlangsung lebih dari satu tahun. Namun aset tetap tersebut tidak harus digunakan secara terus-menerus atau bahkan sering.

2.1.2 Penggolongan Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.⁸

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam

⁸ <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor 07.pdf>

kondisi siap dipakai. Contohnya tanah kantor, tanah rumah sakit, dan tanah rumah dinas.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya bangunan kantor, bangunan rumah sakit, dan bangunan rumah dinas.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Contoh dari peralatan yaitu buldozer, mikroskop, alat-alat dapur, dan sound system. Dan contoh dari mesin yaitu mesin cetak, mesin pengeboran minyak, dan mesin pembangkit listrik.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2 Perolehan dan Pengukuran Aset Tetap

2.2.1 Perolehan Aset Tetap

Akuntansi perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

a. Perolehan aset Tetap dari Pembelian

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian tunai dan pembelian kredit. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah pengeluaran-pengeluaran.

Adapun jurnalnya yaitu:

Harga beli	xxx	
PPN	xxx	
Premi asuransi	xxx	
Biaya pemasangan	xxx	
		Xxx

Dalam pembelian kredit jangka panjang umumnya melibatkan bunga kredit, bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan implisit.

Bunga eksplisit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terusterang dalam pembelian kredit.

Bunga implisit adalah bunga yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan secara terang sehingga harus mencari-mencari dulu berapa besar bunganya.

b. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap kesatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat handal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti ada nyaharta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Adapun jurnalnya yaitu:

Donasi	Xxx	
Modal Donasi		xxx

c. Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Adapun jurnalnya yaitu:

Tanah	Xxx	
Gedung	Xxx	
Peralatan	Xxx	
Kas		xxx

d. Perolehan Aset Tetap dari Pertukaran Aktiva

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian

yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap dengan pertukaran yang sejenis:

Aset tetap yang baru	xxx	
Akumulasi penyusutan aset tetap	xxx	
		xxx
Aset tetap yang sejenis		xxx
Keuntungan pelepasan aset tetap yang lama	xxx	
		xxx
Kas		xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap dengan pertukaran yang tidak sejenis:

Aset tetap	xxx	
Kas	xxx	
		xxx
Aset tetap yang tidak sejenis		xxx

2.2.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui

harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung terdiri dari:

1. Biaya Administrasi
2. Biaya permulaan
3. Biaya persiapan tempat
4. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
5. Biaya pemasangan (*instalation cost*)
6. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
7. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).

Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan dan pra produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk

mencantumkan nilai aset tetapnya di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1995 adalah Rp. 300.000.000. Pada waktu akan menyusun neraca awal tahun 2006, Tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalnya dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp. 360.000.000. Dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan di neraca adalah Rp. 360.000.000.

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan nilai wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal penyusunan neraca awal. Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset setelah disusunnya neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya.

2.2.3 Metode Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) sebagai:

Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan penyajiannya pada periode-periode setelah pengakuan awal nilai aset tetap.⁹

⁹ <http://www.ksap.org/Buletin/BULTEK05.pdf>

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun Akumulasi Penyusutan dengan lawan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan disajikan sebagai pengurang akun Aset Tetap.

Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun
2. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan
3. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Ilustrasi Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan

1. Metode garis lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:

- Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 10.000.000
- Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp 10.000.000

b. Penyusutan tahun pertama adalah $Rp\ 10.000.000 : 5 = Rp\ 2.000.000,00$

c. Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 2.000.000,	
Akumulasi penyusutan		Rp. 2.000.000,

d. Catatan tahun kedua hingga kelima adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 2.000.000,	
Akumulasi penyusutan		Rp. 2.000.000,

2. Metode Saldo Menurun Ganda

Metode penyusutan saldo menurun inilah yang digunakan Kantor Camat Kotaroh kabupaten Serdang Bedagai dalam menyusutkan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Camat Kotaroh tersebut.. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus.

Persentase penyusutan ini kemudian dikalikan dengan nilai buku.

Contoh:

a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:

- Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 10.000.000
- Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.

c. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan bahwa mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda.

Berdasarkan informasi di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

1. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp 10.000.000:
2. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$(1/\text{Masa manfaat} \times 100\% \times 2)$$

Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:

$$(1/5) \times 100\% \times 2 = 40\%$$

Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima adalah :

Tabel 2.1
METODE MENURUN BERGANDA

TAHUN	NILAI BUKU	PERSENTASE PENYUSUTAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	$2 = 2_{t-1} - 5_{t-1}$	3	$4 = 2 \times 3$	$5 = 5_{t-1} + 4_t$
0	10.000.000	40%	0	0
1	10.000.000	40%	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40%	2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40%	1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	40%	864.000	8.704.000
5	1.296.000	pembulatan	1.296.000	10.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah**, Buletin Teknis 05

3. Metode Unit Produksi

Dengan menggunakan metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai

yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

Contoh:

a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:

- Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 12.000.000;
- Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.

c. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar

d. Produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar.

e. Tarif penyusutan: Nilai yang dapat disusutkan dibagi perkiraan output
$$\text{Rp. } 12.000.000 / 60.000 = \text{Rp } 200 \text{ per lembar};$$

f. Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Metode Unit Produksi

Tahun	Produksi Per Tahun (Lembar)	Tarif Penyusutan	Besarnya Penyusutan
1	16.000	200	3.200.000
2	9.200	200	1.840.000
3	11.600	200	2.320.000
4	10.700	200	2.140.000
5	12.500	200	2.500.000
Total	60.000		12.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah**, Buletin Teknis 05¹⁰

2.3 Pengeluaran Aset Tetap

2.3.1 Pengeluaran Modal (*capital expenditure*)

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibebankan menjadi 2, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam

¹⁰[http://www.ksap.org/Buletin/BULTEK05.Op. Cit.](http://www.ksap.org/Buletin/BULTEK05.Op.Cit.), hal 15

bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran modal (*capital expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah tingkat keefisienan aktiva tetap, juga memperpanjang umur ekonomis suatu aset tetap (manfaat ekonomisnya lebih dari satu tahun buku). Biaya ini dikeluarkan dalam nominal yang cukup material. Selain itu tingkat keseringan pengeluaran modal ini jarang terjadi. Contohnya biaya yang dikeluarkan dalam pembelian aktiva tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembelian salah satu atau lebih komponen aset tetap maupun biaya penggantian komponen-komponen aset yang perlu diganti. Biaya yang dikeluarkan dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, meningkatkan kapasitas produksi maupun tingkat efisiensi dan juga bisa memperpanjang umur ekonomis atau masa manfaat atas aset tetap. Contohnya adalah pembelian mesin produksi, pembelian komponen mesin produksi, memperbaiki kapasitas mesin produksi, yang umumnya jumlah yang dikeluarkan untuk itu sangat material.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran modal (*capital expenditure*) mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Memberikan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- b. Dapat meningkatkan kapasitas dan mutu operasi perusahaan
- c. Jumlahnya relatif besar atau di atas kapasitas
- d. Tidak bersifat rutin

2.3.2 Pengeluaran Pendapatan (*revenue expenditure*)

Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah pengeluaran atau biaya-biaya yang hanya memberikan manfaat ekonomis pada saat periode berjalan terjadinya pengeluaran. Pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap pada neraca tetapi langsung dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Dilihat dari nilai materialitasnya, pengeluaran pendapatan ini nilainya cenderung kecil, alias tidak material bagi perusahaan. Manfaat ekonomisnya yang diperoleh tidak lebih dari satu tahun buku. Pengeluaran ini biasanya juga sering terjadi dalam operasional perusahaan dan berulang ulang. Contohnya seperti pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersihan mesin, melumasi mesin agar bisa beroperasi seperti biasanya. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini biasanya tidak membuat umur ekonomis mesin bertambah, juga tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi mesin maupun tingkat efisiensinya dan nominal yang dikeluarkan cenderung tidak material dibanding perolehan mesin itu sendiri. Pengeluaran seperti ini berulang terjadi dan pencatatannya langsung dibebankan pada periode tersebut.

Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) mempunyai ciri-ciri yang yaitu:

- a. Memberikan manfaat hanya periode berjalan
- b. Tidak meningkatkan kapasitas mutu operasi perusahaan
- c. Jumlahnya relatif kecil atau di bawah kapasitas
- d. Bersifat rutin

2.4 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan (pengguna) informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu laporan keuangan harus disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya (*full disclosure*). Laporan keuangan harus mengungkapkan semua hal yang dalam ini berkaitan dengan aset tetap. Unsur-unsur laporan keuangan yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca:

Aset

Aset Tetap

Tanah	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<u>(xxx)</u>
Total Aset Tetap	xxx

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx
Total Ekuitas Dana Investasi	xxx

Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap. Jumlah total aset tetap harus sama dengan nilai akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, dalam CALK juga harus diungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap dan nilai aset tetap.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada Penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Dalam Buku Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif oleh Emzir mengatakan bahwa:

Pendekatan Kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran pernyataan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik.¹¹

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah akuntansi aset tetap pada Kantor Camat Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai yang berlokasi di Jl. Utama No. 66, Kotarih Pekan, Kotarih.

¹¹Emzir, **Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif**, Edisi 1, Cetakan 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 28

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, daftar aset tetap, penggolongan aset tetap, perolehan dan pencatatan aset tetap, metode penyusutan dan pengeluaran aset tetap, dan laporan neraca.

Penelitian dilakukan dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelaahan berdasarkan kepustakaan dimana data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah penelitian ke pustakaan.

Menurut Kutha Ratna Dalam buku Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian oleh Andi Prastowo mengatakan **“Metode Kepustakaan merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.”**¹²

¹²Prastowo, Andi, **Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian**, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hal 190

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang dipilih atau diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian.

Dalam buku Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian oleh Andi Prastowo mengatakan bahwa:

Metode Lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan. Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu kealaman maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.¹³

Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada Kantor Camat Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, yakni:

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan dokumentasi, yaitu salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara pengambilan langsung ke objek penelitian tersebut.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan Komparatif.

1. Metode Analisis Deskriptif

¹³**Ibid**, hal 183

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁴

Metode analisis deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek yang diteliti.

2. Metode Analisis Deduktif

Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai kaca mata kudanya dalam melihat masalah penelitian.

Setelah menerapkan analisis tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat pada penginventarisasian aset tetap yang belum maksimal pada Kantor Camat Kotaroh Kabupaten Serdang Bedagai pada masa mendatang. Sesuai dengan PSAP, maka kriteria baik tidaknya akuntansi aset tetap adalah:

1. Perolehan dan pengukuran aset tetap baik, apabila semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam

¹⁴Nazir, Moh, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam, Darussalam: Ghalia Indonesia, 2005, hal 54

kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan diperhitungkan sebagai nilai perolehan.

2. Penyusutan aset tetap yang baik, apabila nilai penyusutan dihitung dengan salah satu metode yang diakui dalam PSAP, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.
3. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap baik, apabila semua pengeluaran telah digolongkan secara tepat menjadi pengeluaran belanja untuk pemeliharaan dan pengeluaran belanja untuk peningkatan aset tetap.
4. Penyajian aset tetap dalam neraca baik, apabila aset tetap disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya.